

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PENGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH  
(Studi Kasus pada Pemerintahan kabupaten merauke).**

**SKRIPSI**

**OLEH**

LUDIANA . W . KINAMDE

NPM : 2014-6220-1111



JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
MERAUKE  
2022

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PENGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus pada Pemerintahan kabupaten merauke).**

**SKRIPSI**

Skripsi di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana ekonomi jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis  
universitas musamus merauke

**Oleh:**

LUDIANA . W . KINAMDE

NPM : 2014-6220-1111



JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUSAMUS  
MERAUKE

2022

## LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PENGUNAAN INFORMASIH KEUANGAN  
DAERAH

NAMA : LUDIANA W KINAMDE

NPM : 2014 62 201111

JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui,  
Pembimbing:

Okto Irianto, S.E., M.Si, AK  
NIP: 1229108301

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Okto Irianto, S.E., M.Si, AK  
NIP: 19860220194041002

Caecilia Henny Setyawati, SE., M.Si  
NIDN: 1204028102

## PENGESAHAN KELULUSAN

NAMA : LUDIANA W KINAMDE  
NPM : 2014 62 201111  
JURUSAN : AKUNTANSI  
JUDUL : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASIH KEUANGAN DAERAH

Telah diuji dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji pada tanggal 28 sep 2022

### TIM PENGUJI

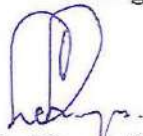
Penguji I : Dina fitri saptarini,S.E..M.Si (  )  
NIDN. 1417097701

Penguji II : Caecilia Henny Setyawati, SE..M.Si (  )  
NIDN. 1204028101

Penguji III : Muhamad Ilham, SE..M.Si.,Ak.,CA (  )  
NIDN. 0001098706

Penguji IV : Maria Kaok,S.E.,M.M (  )  
NIP.199502122019032026

Mengetahui,  
Ketua Sidang



Paulus Peka Hayon,S.E.,M.Si  
NIDN. 0024106410

## PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI DAN BELUM PERNA DI AJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIA PADA PERURUAN TINGGI ATAU DAPAT DI BUKTIKAN BAHWA SKRIPSI INI HASIL JIBLAKAN,MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

Merauke 28 Oktober 2022

Yang menyatakan



LUDIANA W KINAMDE

201462201111

## RIWAYAT HIDUP



LUDIANA W KINMDE Panggilan Ludia lahir di dufmira pada tanggal 23 maret 1995 dari pasangan suami istri Bapak Anton Kinamde dan Ibu Ripka Moyuwen. Peneliti adalah anak ke tiga bersaudara. peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln Nusabarong.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu SD YPPK Dufmira Lulus tahun 2008, SMP NEGERI 1 Okaba Lulus tahun 2011. SMA NEGERI 1 Okaba Lulus tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi Unuversitas Musamus sampe dengan sekarang. sampe dengan penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Musamus.

## ABSTRAK

Ludiana W Kinamde, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji “pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna.

Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten merauke. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 30 responden yang merupakan pengguna internal dan eksternal informasi keuangan daerah. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilai signifikansi masing-masing 0,005 dan 0,000. Namun pemahaman laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,082. Sedangkan secara simultan aksesibilitas, penyajian laporan keuangan daerah dan pemahaman laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci : pengaruh penyajian laporan keuangan, daerah laporan keuangan, dan penggunaan informasi keuangan daerah.



information". The background of this study is the number of types into the financial report. Therefore, it is quite hard to obtain which is satisfying all of the local financial information

the study was the primary data. The population of the study was the Provincial Government of Rembang city. The data was collected from those who were internal and external users of the local financial report. The hypothesis of this study was examined by using the multiple regression method.

The study showed that partially, accessibility, to the local financial report presentation affects to the use of local financial information with significance values 0.005 and 0,000. However, understanding local financial reports has no signs of the use of local financial information with the significance values 0.082. Meanwhile, simultaneously accessibility, the report presentation, understanding of local financial report to the use of local financial information with a significance value of 0.000.

**financial reports, accessibility, local financial information**





## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan Kehadirat Allah Yang Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judu : *PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.*

Dalam Kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasi Kepada :

1. Bapak Dr.Beatus Tambaip, MA. Selaku rektor Universitas Musamus Merauke
2. Bapak Okto Irianto,S.E.,M.Si.AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Caecilia Henny setyawati,SE.,M.Si Selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Musamus Merauke.
4. Dosen yang ada di Universitas Musamus Merauke yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Musamus Merauke yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.
6. Orang tua dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis.

Atas segala keterbatasan dalam penyusunan Proposal ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, nama penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Amin.

Merauke, 08 Agustus 2022

Penulis

Ludiana w Kinamde

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Ladasan teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	15
C. Kerangkah pikir.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Tempat waktu penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Populasi dan Sampel.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	25
F. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	25
G. Pengujian Data.....	27
H. Metode Analisis Data.....	27
I. Analisis Regresi Berganda.....	29
J. Pengujian Asumsi Klasik.....	29
K. Penjualan Hipotesis.....	30

L.Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum .....	30
B. Karakteristik Respondan.....	31
C. Analisis Data.....	32
D.Uji Multikorelitas.....	37
E. Uji Multikolinearitas.....	38
F. Uji Heteroskedastisitas.....	38
G. Hasil Uji Penelitian.....	40
H. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
C. Penutup.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Demografi Responden.....	33
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	34
Tabel 4. HASIL Uji Vabilitas.....	35
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas.....	36
Tabel 6. Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 7. Regresi linear Berganda.....	42
Tabel 8. Hasil Uji Simultan.....	43
Tabel 9. Uji T.....	44
Tabel 10. koefisien determinasi.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	20
Gambar 4.1 Grafik histogram.....	38
Gambar 4.2 Grafik Normal plot.....	39
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah daerah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, Mulyana, (2006) dalam Bandariy, (2011). Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, Mardiasmo, (2002) dalam Bandariy (2011). Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, Mardiasmo, (2002) dalam Bandariy (2011). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.



Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk Kompas (2008) dalam Rohman (2009). Pernyataan tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2007. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun berturut-turut, sampai tahun 2007, opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangan pemerintah pusat.

Alasan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai buruk dalam melaporkan keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Kepala BPK, Anwar Nasution menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini buruk dalam laporan keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya (BPK, 2008) Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond, (2002) dalam Aliyah dan Anhar (2012) dalam Bandariy (2011), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Ratna Amalia Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian pelaporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah penyajian pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006 dalam Sande, 2013).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006). Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan (Arfianti 2011). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Latar Belakang Diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap upaya penggunaan informasi keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
3. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah kabupaten merauke.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengolahan laporan keuangan daerah kabupaten merauke

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Laporan Keuangan Daerah**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang ini pada setiap daerah dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. Sedangkan untuk komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah menurut (Indra Bastian) (2010:138) (PSAP) No. 01, alinea 14, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan ini berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, alinea 9, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ) di nyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.



Berdasarkan hasil yang di atas laporan keuangan daerah kabupaten merauke adalah untuk menginformasikan laporan keuangan daerah kabupaten merauke setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang berkaitan sehingga informasi yang di laporkan ke perinta daerah yang menyediakan informasi keuangan daerah kabupaten merauke.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos pos berikut : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Dari pendapatan diatas dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan daerah adalah mengajikan informasi mengenai posis keuangan yang dimiliki seperti laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran yang menyediakan informasi keuangan daerah kabupaten merauke.

## **1. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Permerintahan (PSAP) No. 1 alinea 36 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) dinyatakan bahwa pengguna atau pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Bandaiy 2011). Berdasarkan hasil yang di atas informasih yang di peroleh dari laporan keuang tersebut di anggap bentuk keterbatasan informasi dari laporan keuangan tersebut pemerintah daerah kabupaten merauke.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pemda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Merauke.

### **3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut (Governmental Accounting Standard Board) (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik. Dari pendapat di atas dapat dipahami, laporan keuangan daerah yang dilaporkan secara keseluruhan yang diinformasikan selama 1 periode pelaporan keuangan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten Merauke sehingga penyajian laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi laporan keuangan daerah kabupaten Merauke.

a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.

b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

## 1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

## 2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

### a) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

### b) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Sedangkan menurut Belkaoui (2006: 221) karakteristik kualitatif dari laporan keuangan adalah relevansi dan materialitas, bentuk dan substansi, keandalan, kebebasan dari biasa, komparabilitas, konsistensi, dan dapat dimengerti.

Dari karakteristik tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan hendaknya sebagian besar didasarkan pada kebutuhan para pengguna laporan. Informasi hendaknya sejauh mungkin bebas dari bias pembuatnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan, para pengguna hendaknya tidak hanya memahami informasi yang disajikan, namun juga hendaknya mampu menilai keandalannya dan membandingkannya dengan informasi mengenai peluang-peluang alternatif dan pengalaman sebelumnya Menurut Bandariy (2011) Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan daerah kabupaten merauke

## **2. Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan.

Menurut Bandariy (2011) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*.

Dari pendapat diatas dapat di pahami, data yang di laporkan sesuai dengan laporan keuangan yang di susun dan juga dapat menghasilkan laporan yang baik. dan laporan keuangan juga dapat di laporkan dengan mudah ke pemerintah daerah kabupaten merauke dalam laporan keuangan di buat dan di susun bahwa laporan keuangan yang di buat akan menjadi informasi keuangan bagi pemerintah daerah kabupaten merauke.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Peggy Sande (2013), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik.

Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability dan sstewardship).

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002 dalam Peggy Sande 2013). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004, dalam Mulyana, 2006 dalam Peggy Sande 2013).

Yaitu masyarakat bisa mengakses laporan keunagn dengan baik dengan menggunakan (internet)kemudahan pemerinta daerah memperoleh informasi keuangan daerah.

Menurut Yani (2009) dalam Peggy Sande (2013), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) SIKD adalah system informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004).

Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

- a. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
- b. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
- c. Accesible yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website)

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Sanjaya., dkk (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)	(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng (3) Terdapat pengaruh signifikan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan



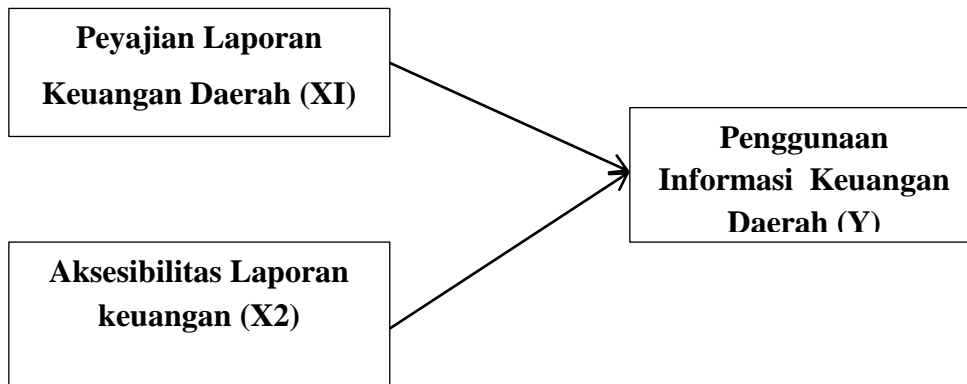
			terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buleleng
2	Ardi Rahmawan Saputra (2012)	Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah
3	Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana dan pada akhirnya akan mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga good governance dan clean government yang menjadi cita-cita dari pemerintah kabupaten Jepara secara bertahap akan terwujud.

4	Azlim., dkk (2012)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Skpd Di Kota Banda Aceh	Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di dinas Kota Bandung. PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP.
5	Abdul Rohman (2009)	Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten Tegal).	(1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
6	Ileana Steccolini (2002)	Local Government Annual Report: an Accountability Medium?	Penelitian tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan

			<p>akuntabilitas. Analisis dari hasil penelitian tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas adalah bahwa laporan tahunan digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan laporan keuangan tersebut belum tentu dibaca oleh pengguna internal itu sendiri.</p>
--	--	--	---

### C. Kerangka Berpikir

Adapun gambar kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **D. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat di pahami (PP No. 71 Tahun 2010 ) dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009). Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil feedback dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah kabupaten merauke.

## **2. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al, 1990, dalam Rohman, 2009). mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian tersebut yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Dari pendapat diatas dapat di pahami untuk menginformasikan laporan keuangan yang berdasarkan data lapaoran keuangan pemerintah daerah kabupaten merauke sehingga mendapatkan laporan keuangan dengan informasikan laporan keuangan bahwa dengan adanya laporan keunagn untuk memberikan informasi tentang posis keuangan dan informasi lainnya bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan pemerinta daerah kabupaten merauke.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka di tuangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini dapat di tempatkan penelitian dan waktu penelitian adalah:

##### 1. Tempat Penelitian

Yang menjadi tempat penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

##### 2. Waktu penelitian

Adapun waktu Penelitian sejak Bulan Februari- Maret 2020

#### **B. Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini ada independen dengan pendekatan penelitian. Penelitian independen adalah penelitian yang digunakan berupa studi lapangan menelusuri data yang dikumpulkan adalah berupa gambar, rekaman, dan catatan yang akan digunakan sebagai literatur penentuan untuk merumuskan masalah penelitian.

Peneliti menggunakan metode independen agar dapat mendalami sejauh mana Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

#### **C. Populasi dan sampel**

Populasi Dan sampel Dalam Penelitian ini adalah laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah serta Kepala Dinas, Sekertaris, dan Ka. Sub bagian Keuangan yang objek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang di perlukan untuk pengambilan keputusan, jenis data dapat di bedakan menjadi dua jenis data independen dan data responden. Penelitian ini menggunakan kedua jenis data yang telah dikemukakan di atas yaitu data independen dan responden.

Data independen dalam penelitian ini yaitu berisi mengenai profit dan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke,



sedangkan data independen berupa data yang di sajikan dalam bentuk laporan keuangan Daerah yang terdapat dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah

### a. Data primer

Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantar. Dalam hal ini data primer didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara secara langsung ditempat penelitian.

### b. Data sekunder.

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

## **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (sugiyono 2010). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum objek penelitian
2. Mengadakan wawancara dengan Kepala Dinas, Sekertaris dan Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Merauke.
3. Mempelajari Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
4. Mempelajari aktivitas dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

## **F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### 1. Penyajian laporan keuangan daerah (Variabel Independen.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan daerah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang menggunakan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

### 2. Aksesibilitas laporan keuanga

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan

keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang menggunakan indikator yaitu data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (UU No.33 Tahun 2004).

### 3. Penggunaan informasi keuangan daerah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan ini adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Penggunaan informasi keuangan daerah diukur menggunakan kuisisioner dengan indikator : transparansi pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah , dengan skala pengukuran respon yaitu 5 (lima) poin skala likert, (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju

## **G. Pengujian Data**

### 1. Uji validitas

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986).

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai cut off untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpha lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978).

## **H. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisa adalah metode responden. Metode responden adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan yang sebenarnya.

1. Merumuskan masalah yang ditemui untuk kemudian dapat diteliti dan dicari solusinya.
2. Mengajukan permohonan penelitian dengan cara memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang di pakai dalam penyusunan proposal.

3. Disposisi pimpinan Instansi yaitu setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama, menindak lanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan pimpinan instansi.
4. Pengumpulan informasi dengan mencari berbagai literatur dari berbagai sumber, seperti di perpustakaan, yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti, demi lancarnya proses penyusunan Proposal ini. Juga, melalui media elektronik, berupa akses data dalam internet untuk melengkapi teori-teori yang ada untuk lebih memahami permasalahan yang ditemui.
5. Mencari data secara langsung yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
6. Melakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan mengkaji kembali apakah sesuai dengan teori-teori yang telah ada.
7. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dari penulis sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, apakah permasalahan yang telah dibahas. Tersebut memiliki dampak baik perusahaan itu sendiri.
8. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

## **I. Analisis Regresi Berganda**

Metode Analisis Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variable independen (Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan, dengan variable dependen (Penggunaan Informasi Keuangan Daerah). Untuk menguji hipotesis diatas, digunakan model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefesien regresi

X<sub>1</sub> = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X<sub>2</sub> = Aksesibilitas laporan keuangan

Y = Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

E = Standar Error

## **J. Pengujian Asumsi Klasik**

### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai kontribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal

### **2. Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel  $x$  tidak saling berkorelasi linear

### **1. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

### **2. Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi, misalnya perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat keakuratan data. Dengan kata lain, heterokedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varians yang konstan (Pratisto 2004:149 dalam Ranti Oktari 2011).

## **K. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji  $t$ . Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini adalah Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi. Hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini adalah Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi.

**L. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A . Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Pada penelitian ini jumlah koesioner yang di sebarakan sebanyak 30 koesioner yang dilakukan dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 10 Mei dan koesioner yang kembali sebanyak 30 koesioner artinya persentase tingkat pengembalian koesioner 100%.

Langkah penyebaran Koesioner dilakukan selama 1 minggu dengan memberikan secara langsung kepada ke kbidang keuangan, dan bidang keuangan membantu untuk di sebarakan koesionernya.

Kemudian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, koesioner diambil kembali. Pengembalian koesioner dilakukan dua kali, sebab saat pertama pengambilan masih ada yang belum selesai dalam pengisian koesionernya. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengambilan koesioner.

#### Ringkasan Pengiriman dan Pengambilan Koesioner.

Koesioner	Jumlah	Persentase (%)
Koesioner yang dibagi	30	100 %
Koesioner yang tidak kembali	0	0
Koesioner yang tidak diolah	0	0
Koesioner yang dapat diolah	30	100%

#### B. Karakteristik Responden

Karakteristik demograsi responden dan penelitian ini merupakan profil dari 30 responden dari Pegawai kantor badan pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Karakteristik responden ini meliputi jenis kelamin dan jabatan sebagai. Demograsi responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2 Demografi Responden**

<b>N0</b>	<b>Kriteria</b>		
<b>1</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase(%)</b>
	Laki-laki	17	56 %
	Perempuan	13	44 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>
<b>2</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>		
	SMA	20	66,6%
	D1	1	3,33%
	D3	1	3,33%
	S1	6	20%
	S2	2	6,66%
	<b>Jumlah</b>	<b>30 Responden</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan table 4.2 menunjukkan bawah karakteristik responden menurut jenis kelamin perempuan lebih mendominasi daripada jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang atau sebesar 44% dan laki-laki sebanyak 17 orang atau sebesar 56%.

Pendidikan terakhir yang didominasi SMA sebanyak 20 orang, D1 1 orang, D3 3 orang, S1 sebanyak 9 orang, S2 2 orang, dan jumlah semuanya adalah 35 orang.

### **C. Analisis Data**

Menurut Sugiono (2013) Statistic deskriptif iyalah proses transformasi dari data penelitian bentuk tabel maka akan dapat dipahami dan di interprestasikan. Statistic deskripfit biasanya dipakai agar memberi informasi tentang krakter variabel penelitian penting. Acua yang dipakai berupa:mean, minim,maks, dan standar deviasi. berupa:mean, minim,maks, dan standar

**Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif****Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std.Devi ation	N
Predicted Value	13.7540	17.8051	15.5333	1.00707	30
Std. Predicted Value	1.767	2.256	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.801	2.226	1.290	.413	30
Adjusted Predicted Value	11.7324	19.0811	15.4404	1.22911	30
Residual	8.44641	10.24600	00000	4.12752	30
Std. Residual	1.975	2.395	.000	.965	30
Stud. Residual	2.060	2.621	.010	1.028	30
Deleted Residual	9.19063	12.26756	.09289	4.69054	30
Stud. Deleted Residual	2.202	2.979	.019	1.086	30
Mahal. Distance	.050	6.888	1.933	1.896	30
Cook's Distance	.000	.452	.047	.099	30
Centered Leverage Value	002	.238	.067	.065	30

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

Dari data tabel diatas bawah jumlah responden 30 responden ini variabel Penyajian Laporan Keuangan nilai min sebesar 13.7540 nilai maks sebesar 17.8051 kemudian rata-rata total jawaban responden 15.5 333 dan standar deviasi 1.00707 Selanjutnya variabel Aksesibilitas Laporan keuangan nilai min sebesar 1.767, nilai maks sebesar 2.256 kemudian rata-rata total jawaban responden,000, dan standar deviasi 1.000 Selanjutnya Penggunaan Informasi keuangan Daerah nilai min sebesar .801 nilai maks sebesar 2.226 kemudian nilai rata-rata total jawaban responden 1.290 dan standar deviasi .413.Hasil uji statistik deskriptif.



### a. Uji Validitas

Setelah dilakukan perhitungan dengan cara mengoreksi skor tiap butir pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut : skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas**

		Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan keuangan	Penggunaan Informasi keuangan Daerah
Penyajian Laporan Keuangan	Pearson Correlation	1	452	172
	Sig. (2-tailed)		012	362
	N	30	30	30
ksesibilitas Laporan keuangan	Pearson Correlation	452	1	223
	Sig. (2-tailed)	012		236
	N	30	30	30
Penggunaan Informasi keuangan Daerah	Pearson Correlation	172	223	1
	Sig. (2-tailed)	362	236	
	N	30	30	30

### b. Uji Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Perhitungan dilakukan dengan dibantu program SPSS 25 Adapun hasil reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil uji Reliabilitas**

Variabel	Variabel Cronbach's Alpha	Rtabel	Hasil
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	0,915	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,862	0,60	Reliabel

realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha  $> 0,60$ . Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel penyajian Laporan Keuangan (X1), Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa instrument yang terdapat pada ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

### **3 . Hasil Uji Asumsi Klasik**

#### **C . Uji Normalitas**

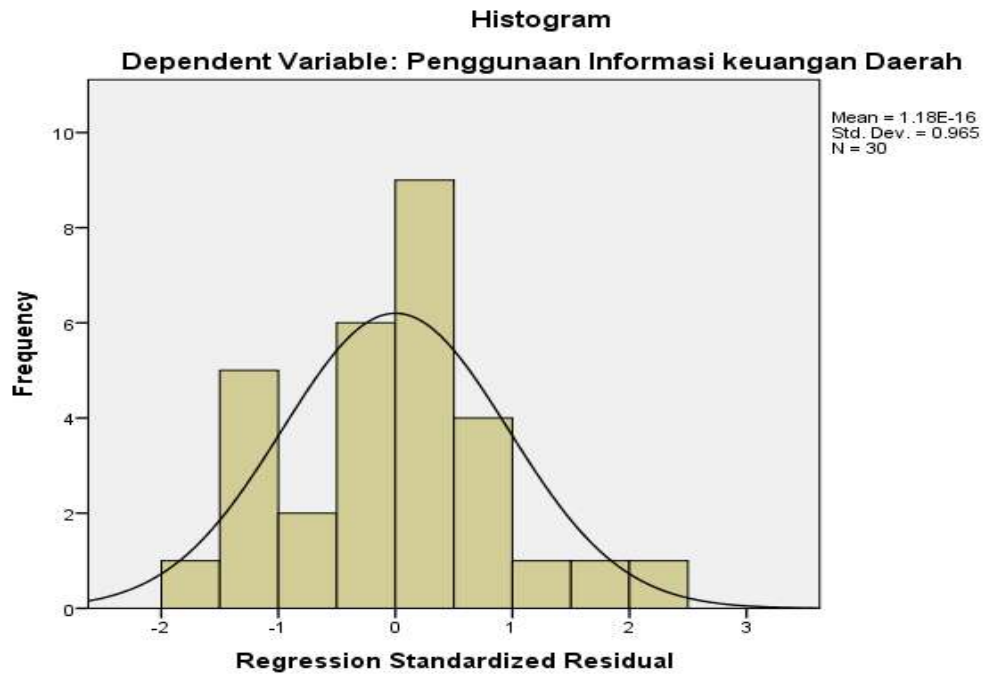
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Bila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam menguji normalitas data maka ada dua cara yang dapat digunakan yaitu :

##### **a. Analisis Grafik**

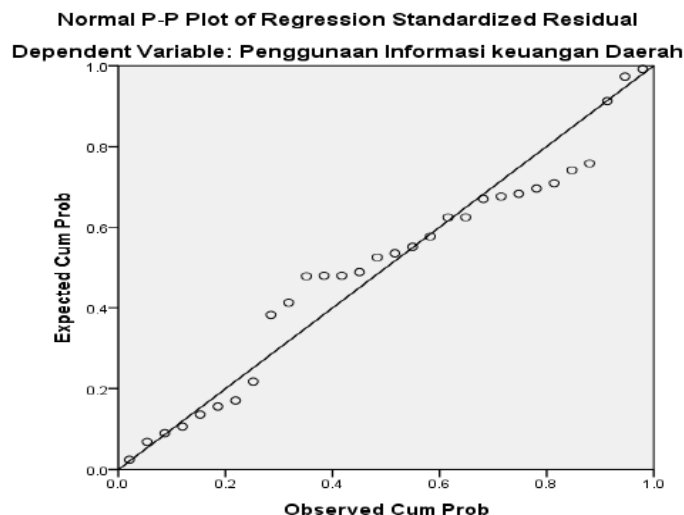
Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk lebih memberi keyakinan dan memberi hasil yang lebih handal dapat digunakan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus

diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

**Gambar 4.1**  
**Grafik histogram dengan kurva normal**



Pada gambar di atas kurva penggunaan informasi keuangan daerah memiliki bentuk kurva yang cenderung ditengah tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dengan kata lain data pada variabel tersebut cenderung terdistribusi normal.



**Gambar 4.2 Grafik Normal Plot**

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal sehingga asumsi normalitas dapat terpenuhi.

**D . Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen atau korelasi antara variabel independenya rendah. Keberadaan multikolinearitas dideteksi dengan *Varians Inflating Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Hasil uji multikolinearitas tersaji pada tabel berikut ini :

**E. Uji Multikolinearitas**

**Coefficients**

Model	Collienarity Statistik	
	Tolerance	Vip
Penyajian Laporan Keuangan	796	1.256
Aksebilitas Laporan keuangan	796	1.257

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

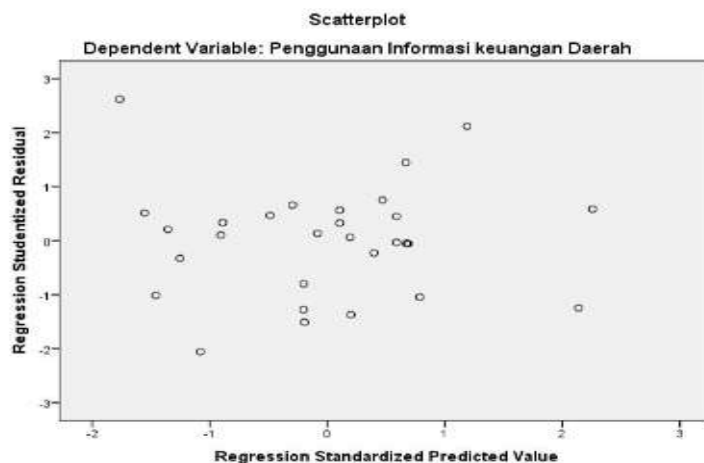
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

## F. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah :

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka untuk membuktikan uji heteroskedastisitas dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penggunaan informasi

keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independennya (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan).

### G. Hasil Uji Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

**Tabel 4.15**  
**Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.318	3.576		3.165	.004
Penyajian Laporan Keuangan	.096	.222	.090	.430	.670
Aksesibilitas Laporan keuangan	.199	.229	.182	.870	.392

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada kolom Unstandardizer Coefficients bagian B diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:  $Y = 0,11.318 + 0,096X_1 + 0,199X_2 + e$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai Konstanta sebesar 0,11.318 menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah, maka nilai penggunaan informasi keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0, 11.318

2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) sebesar 0,069 bahwa jika terjadi peningkatan variabel penyajian laporan euangan daerah satu poin maka akan meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah (Y) sebesar 0,11.318 satuan dengan anggapan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) adalah tetap/konstan.
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) sebesar 0,199 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan variabel aksesibilitas laporan keuangan satu poin maka akan meningkatkan penggunaan informasi keuangan (Y) sebesar 0,11.318 satuan dengan anggapan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) adalah tetap/konstan.
4. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

## G. Hasil Uji Hipotesis

### 1. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan (X1) dan Aksesibilitas laporan keuangan (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Nilai F hitung diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistik seperti terlihat pada tabel 4.16. Dengan rumus yang digunakan untuk menentukan F tabel adalah :

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)**  
**(Uji Statistik F)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	29.411	2	14.706	.804	.458 <sup>b</sup>
1 Residual	494.055	27	18.298		
Total	523.467	29			

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan keuangan, Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F hitung sebesar 0,804 dengan signifikan 0,458 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## 2. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2), secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Nilai t hitung dapat diperoleh dengan menggunakan alat bantu program statistic yaitu SPSS 25 2022 seperti terlihat pada tabel 4.17 di bawah ini

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)**

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.318	3.576		3.165	.004
Penyajian Laporan Keuangan	.096	.222	.090	.430	.670
Aksesibilitas Laporan keuangan	.199	.229	.182	.870	.392

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25 2022



Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 30 orang, maka nilai t tabel dapat diperoleh melalui  $df$  (degree of freedom) = jumlah sampel (n) + jumlah variabel yang diteliti (k). Sehingga dalam penelitian ini  $n = 30$  dan  $k = 3$ , jadi  $df = 30 - 3 = 27$ , maka dapat diperoleh t tabel dari penelitian ini adalah 3.165. Dari tabel uji parsial diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) dapat menjelaskan variabel penggunaan informasi keuangan daerah (Y).

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.237 <sup>a</sup>	.056	-.014	4.27766

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25 2022

Hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,237 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan dengan penggunaan informasi keuangan daerah sebesar 23,7%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,056 yang berarti bahwa variabel dependen (penggunaan informasi keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan) sebesar 5,6% dan sisanya sebesar 94,4% dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

## ***H. Pembahasan***

Penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut :

### **1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga publik bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik Mardiasmo (2004: 30). Oleh karena itu pihak pemerintah harus senantiasa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dan teori sinyal. Dalam teori keagenan dibahas tentang masalah keseimbangan informasi atau dikenal dengan *assimetri information*. Dalam hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat dilihat pada pihak penyajian dan pihak pengguna dimana kedua pihak ini harus memiliki keseimbangan informasi. Pihak penyajian harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak pengguna tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan dalam teori sinyal juga dibahas tentang pemberian sinyal berupa informasi-informasi yang bersal dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ketika entitas pemerintah menyajikan laporan keuangan dengan baik maka hal tersebut dapat dinikmati atau dipergunakan oleh para pengguna informasi keuangan. Ketika informasi keuangan pemerintah telah dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut bisa dinilai transparansi dan akuntabilitasnya oleh para pengguna laporan keuangan. Berarti laporan keuangan pemerintah telah mampu dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan.

## **2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan tersebut. Dalam hal ini akses yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah satunya *website*. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan oleh Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Berdasarkan hasil temuan empiris, bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan semakin tinggi pula penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis kedua diterima. Ini berarti makin baik aksesibilitas laporan keuangan, makin baik penggunaan informasi keuangan daerah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah.

Dalam hipotesis kedua ini, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah maka dapat dikatakan bahwa semakin baik akses yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak pengguna informasi keuangan maka akan semakin baik pula informasi tersebut dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah memberikan akses kepada publik maka pemerintah memiliki tanggung

jawab kepada publik untuk memberikan kemudahan dalam hal pengaksesan laporan keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bandary (2011), Saputra (2012), dan Ramadhani (2014)
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bandary (2011), dan Ramadhani (2014)

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian yaitu dengan mengambil sampel dari SKPD sebagai penyaji laporan keuangan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan antara pengguna internal dengan pengguna eksternal laporan keuangan
2. Peneliti yang akan datang agar memperluas variabel yang diteliti, selain variabel yang diteliti sekarang
3. Peneliti yang akan datang juga dapat menggunakan metode interview selain dengan kusioner untuk mendapatkan data yang lebih kredibel

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandary,Himmah, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). *proposal*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Tegal: Penerbit Universitas Diponegoro
- Kawedar,Warsito. Rohman, dan Sri Handayani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Semarang*: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo,(2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Akuntansi Pemerintah,Vol.2, No.11, pp. 1-17*.
- Mulyana, Budi, (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, pp, 65-78*.
- Rohman, Abdul (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah). *Jurnal MAKSI. Vol.7 NO.2. Hal. 105-220. Agustus 2007*.
- Sande, Peggy. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *proposal*. Universitas Negeri Padang.

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aksesibilitas Laporan keuangan, Penyajian Laporan Keuangan <sup>b</sup>		. Enter

- a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah  
 b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.237 <sup>a</sup>	.056	-.014	4.27766

- a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan keuangan, Penyajian Laporan Keuangan  
 b. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.411	2	14.706	.804	.458 <sup>b</sup>
	Residual	494.055	27	18.298		
	Total	523.467	29			

- a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan keuangan, Penyajian Laporan Keuangan

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.318	3.576		3.165	.004
	Penyajian Laporan Keuangan	.096	.222	.090	.430	.670
	Aksesibilitas Laporan keuangan	.199	.229	.182	.870	.392

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penyajian Laporan Keuangan	.796	1.256
	Aksesibilitas Laporan keuangan	.796	1.256

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

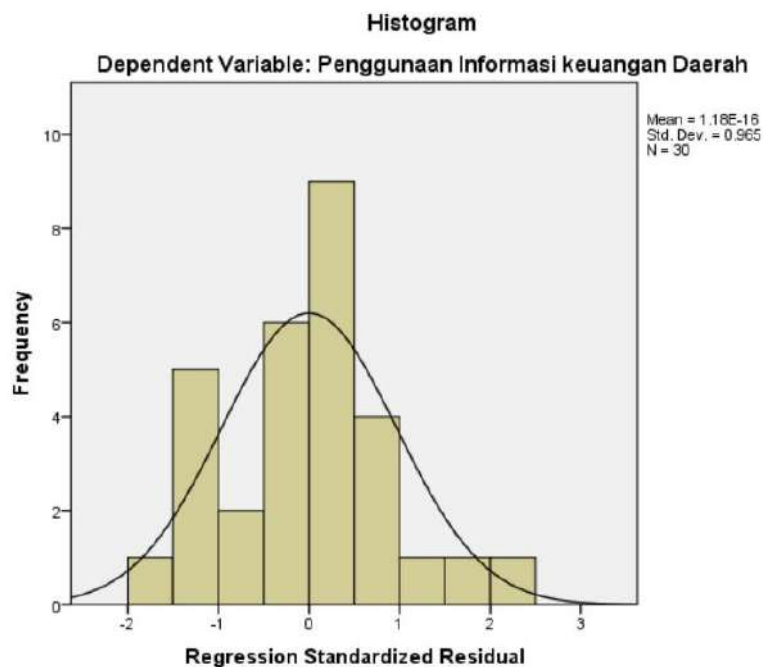
Model	Dimension	Collinearity Diagnostics <sup>a</sup>				
		Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan keuangan
1	1	2.931	1.000	.01	.01	.01
	2	.040	8.614	.25	.15	.99
	3	.029	9.983	.74	.84	.01

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah



Residuals Statistics <sup>a</sup>					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13.7540	17.8051	15.5333	1.00707	30
Std. Predicted Value	-1.767	2.256	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.801	2.226	1.290	.413	30
Adjusted Predicted Value	11.7324	19.0811	15.4404	1.22911	30
Residual	-8.44641	10.24600	.00000	4.12752	30
Std. Residual	-1.975	2.395	.000	.965	30
Stud. Residual	-2.060	2.621	.010	1.028	30
Deleted Residual	-9.19063	12.26756	.09289	4.69054	30
Stud. Deleted Residual	-2.202	2.979	.019	1.086	30
Mahal. Distance	.050	6.888	1.933	1.896	30
Cook's Distance	.000	.452	.047	.099	30
Centered Leverage Value	.002	.238	.067	.065	30

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah



### Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100.0
Cases Excluded <sup>a</sup>	0	.0
Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.535	.541	3

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penyajian Laporan Keuangan	15.8667	4.00632	30
Aksesibilitas Laporan keuangan	13.5667	3.89237	30
Penggunaan Informasi keuangan Daerah	15.5333	4.24860	30

### Inter-Item Correlation Matrix

	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan keuangan	Penggunaan Informasi keuangan Daerah
Penyajian Laporan Keuangan	1.000	.452	.172
Aksesibilitas Laporan keuangan	.452	1.000	.223
Penggunaan Informasi keuangan Daerah	.172	.223	1.000

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
Penyajian Laporan Keuangan	29.1000	40.576	.391	.209
Aksesibilitas Laporan keuangan	31.4000	39.972	.436	.226
Penggunaan Informasi keuangan Daerah	29.4333	45.289	.232	.056

### Item-Total Statistics

	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penyajian Laporan Keuangan	.364
Aksesibilitas Laporan keuangan	.294
Penggunaan Informasi keuangan Daerah	.622

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
44.9667	76.585	8.75129	3

	Penyajian Laporan Keuangan	Aksesibilitas Laporan keuangan	Penggunaan Informasi keuangan Daerah
Penyajian Laporan Keuangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .452* 30	.172 .362 30
Aksesibilitas Laporan keuangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.452* .012 30	1 .223 30
Penggunaan Informasi keuangan Daerah	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.172 .362 30	.223 .056 30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).